

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pilkades banyak terjadi gelombang protes dari masyarakat dan para calon kepala desa yang gagal, kebanyakan mereka menganggap telah dicurangi oleh sistem pengopersonalan alat tersebut, banyak terjadi kendala saat pelaksanaan sebagai misal: saat di sentuh dilayar untuk memilih calon kepala Desa yang akan dipilih kadang tombol toot screennya macet, kemudian kertas print out bukti bahwa pemilih sudah menggunakan hak pilihnya di masukan ke kotak suara namun pada saat dilakukan penghitungan ulang kotak suara yang terdapat bukti pilihan tidak dihitung ulang secara manual, bukti penghitungan hanya dilakukan print out secara global perwilayah perdukuhan. Sehingga faktor-faktor tersebut yang dianggap sebagai bentuk-bentuk adanya proses kecurangan dalam pelaksanaan pilkades. Sebagai contoh permasalahan-permasalahan ada di pemberitaan media elektronik terkait pilkades e-voting Kabupaten Pemalang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode e-voting di kabupaten Pemalang pada tahun 2018?, apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode e-voting di kabupaten Pemalang pada tahun 2018? dan bagaimanakah prospek pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode e-voting di masa depan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggabarkan masalah hukum, hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan, yaitu tentang pelaksanaan pilkades dengan menggunakan metode e-voting di kabupaten Pemalang. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana setelah menyumpulkan data, dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya data diselesaikan dan diolah, kemudian dianalisis deskriptif dengan pendekatan teori Negara hukum dan teori Negara demokrasi. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan: 1) Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang melalui e-voting tidak menganut sistem demokrasi yang baik dimana kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan tidak berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat; 2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui metode e-voting di Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 adalah pembentukan panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa, saksi, dan pelaksanaan pemungutan suara. Faktor penghambatnya adalah kurangnya komunikasi dari penyelenggara kepada masyarakat, kurangnya ketersediaan sumber daya, legalitas pengadaan alat e-voting secara serentak, legalitas pegawai negeri sipil sebagai tenaga ahli/ programer/ operator e-voting, Legitimasi Kotak Suara Pemilih dalam Pilkades e-voting, dan Peluang terjadinya Sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa; 3) Prospek pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode e-voting di masa depan. Bahwa Pemilihan kepala desa diselenggarakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk e-voting. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah electronic voting (e-voting). E-voting yaitu suatu metode pemungutan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. E-voting akan menjadi pilihan dalam pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, e-voting, Kabupaten Pemalang.

ABSTRACT

In the implementation of the village head election there were many waves of protests from the community and failed village head candidates, most of them considered that the system of operating the tool had been cheated, there were many obstacles during the implementation, for example: when touched on the screen to choose a candidate for village head to be elected Sometimes the tool screen button gets stuck, then the paper print out evidence that voters have exercised their voting rights is input into the ballot box, but when the ballot boxes are recounted, the proof of choice is not recalculated manually, the proof of the count is only printed out globally in rural areas. So, that these factors are considered as forms of a fraudulent process in the implementation of village head elections. For example, problems exist in electronic media reports regarding the election of the e-voting village head of Pemalang Regency. The problem in this research is how is the implementation of village head elections using the e-voting method in Pemalang district in 2018? What are the supporting and inhibiting factors what is the implementation of village head elections using the e-voting method in Pemalang district in 2018? And what are the prospects for the implementation of village head elections using the e-voting method in the future? The method used in this research is juridical empirical research, which is research that refers to the norms and principles of law contained in statutory regulations and court decisions and is adjusted to the actual conditions. The specification of this research is descriptive analytical research, which is a study that seeks to describe legal and legal issues and study them or analyze them according to the needs of the research concerned, namely the implementation of the Pilkades using the e-voting method in Pemalang district. The data analysis used is qualitative analysis, where after collecting data, a comprehensive, systematic processing, analyzing and construction is carried out by explaining the relationship between various types of data. Furthermore, the data was completed and processed, then analyzed descriptively with the theory of the rule of law approach and the theory of the democratic state. Based on the foregoing, it can be concluded: 1) Whereas the implementation of the Village Head Election in Pemalang Regency through e-voting does not adhere to a good democratic system in which the implementation policy for the Village Head election which is held is not based on the will and will of the people; 2) Supporting factors in the implementation of village head elections through the e-voting method in Pemalang Regency in 2018 are the formation of an election committee, the cost of selecting village heads, witnesses, and the implementation of voting. The inhibiting factors are the lack of communication from the organizers to the public, the lack of availability of resources, the legality of procuring e-voting tools simultaneously, the legality of civil servants as experts / programmers/ operators of e-voting, Legitimacy of Voters Boxes in the e-voting Pilkades, and Opportunities for Disputes in the Village Head Election; 3) Prospects for the implementation of village head elections using the e-voting method in the future. Whereas the village head election held by utilizing the current development of information technology has brought great changes to humans, including e-voting. The use of computer technology in the implementation of voting is known as electronic voting (e-voting). E-voting is a method of voting in general elections using electronic devices. E-voting will be an option in future elections.

Keywords: *Village Head Election, e-voting, Pemalang Regency.*